

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya akuntansi di sektor publik terutama di pemerintahan daerah Indonesia, menjadikan akuntabilitas sebagai wujud dari pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya bagi instansi pemerintah daerah. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menerapkan prinsip akuntabilitas publik secara konsisten. Kewajiban ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban resmi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Laporan ini tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan kegiatan operasional pemerintahan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan bahwa laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif tertentu. Karakteristik ini berfungsi sebagai ukuran normatif yang memastikan bahwa informasi akuntansi yang disajikan mampu memenuhi tujuan pelaporan, yaitu menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Laporan ini bisa digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat Keputusan atau sebagai bahan rekomendasi. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan haruslah baik. Dalam konteks penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, peran sistem informasi akuntansi keuangan publik menjadi sangat vital. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang

memungkinkan pengelolaan data keuangan secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, proses administrasi keuangan dapat dilaksanakan secara sistematis, mulai dari tahap pengklasifikasian dan penggolongan transaksi, pencatatan keuangan, hingga pemrosesan data menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Penerapan sistem informasi akuntansi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, tetapi juga mendukung terwujudnya prinsip transparansi publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Perkembangan teknologi dalam era digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan keuangan organisasi, termasuk instansi pemerintahan juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan yang serba digital. Teknologi sangat berpengaruh di era society 5.0 ini untuk bisa mengelola bisnis dan pelayanannya. Selain itu penggunaan teknologi informasi dinilai lebih *user friendly* atau mudah digunakan. Sistem informasi bertumpu pada penggunaan *hardware* berupa komputer dan *software* penyimpanan awan (*cloud*). TI mampu memenuhi semua kebutuhan korporasi dengan sangat cepat, tepat, relevan dan akurat. Untuk mendapatkan informasi yang relevan dan berkualitas sangatlah besar dan diharapkan, maka kebutuhan manusia terhadap teknologi sangatlah tinggi,

Di negara berkembang penggunaan teknologi informasi dalam bisnis memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perekonomian perusahaan. Setiap entitas perusahaan maupun organisasi mengharapkan dengan hadirnya teknologi informasi dapat memudahkan dan mengefektifkan pelaporan akuntansi khususnya dalam pelaporan keuangan. Namun hal ini kembali kepada kualitas dan kinerja karyawan dalam menggunakan teknologi, kendati demikian tentunya penggunaan teknologi berpengaruh dalam mengurangi *human error*.

Saat ini banyak pemerintah daerah terutama instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan keuangan, yang menggunakan teknologi informasi yang dapat menghasilkan suatu sistem informasi yang nantinya akan berguna untuk pemangku kepentingan maupun Masyarakat luas karena mudah di akses dan didayagunakan. Salah satu sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang merupakan produk digital yang

dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mulai berlaku sejak 27 September 2019. SIPD merupakan pengembangan dari sistem informasi sebelumnya yang mencakup Pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya (Kementerian Dalam Negeri, n.d.).

Dalam perkembangannya standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia saat ini menggunakan SAP berbasis akrual, hal ini sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Akrual basis merupakan konsep pengakuan akuntansi yang didasarkan pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi tanpa memperhatikan saat terjadinya aliran kas masuk dan keluar dari transaksi tersebut. (Purwantoro Jati, 2019) Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan langkah penting dalam memastikan penyusunan laporan realisasi APBD dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan penguasaan yang baik terhadap SAP, pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung transparansi serta akuntabilitas publik. Sehingga seseorang dapat dikatakan paham akan SAP jika mengerti dan paham bagaimana proses akuntansi itu dilakukan hingga mencapai laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dalam hal ini maka harus sesuai dengan pedoman peraturan pemerintah.

(Bodnar & Hopwood, 2003) dalam (Putri & Endiana, 2020) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan bagian dari sekumpulan peralatan, manusia, dan sumber daya yang digunakan untuk mengubah data, termasuk data keuangan, menjadi informasi yang dapat dikomunikasikan kepada berbagai pihak pengambil Keputusan. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi pada suatu perusahaan/organisasi antara lain: menghimpun dan mengarsipkan data aktivitas dan transaksi yang terjadi, Pengolahan data-data yang dibutuhkan menjadi informasi yang dibutuhkan yang berguna dalam proses penentuan keputusan manajemen. Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) adalah kumpulan komponen/elemen dari suatu organisasi pemerintah yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan pemerintah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

Namun demikian, kehadiran sistem informasi yang memberikan dampak positif, bisa saja menjadi ladang basah dalam penyalahgunaan teknologi informasi, seperti penipuan maupun pembobolan data yang bisa saja

menyerang oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Sehingga disini perlu perlakuan khusus dalam melakukan pengamanan terhadap sistem informasi, keamanan ini tak hanya berkaitan dengan *hardware* maupun *softwrenya* saja namun juga harus memperhatikan ketersediaan, kerahasiaan, dan juga integritas dari sistem informasi tersebut.

Inti dari sistem informasi akuntansi adalah tujuan mendasar yaitu pengumpulan, pendokumentasian, pengklasifikasian, dan pemotongan data untuk tujuan perencanaan, peraturan, dan evaluasi. Sistem ini berfungsi sebagai tulang punggung yang menghasilkan data penting untuk semua proses organisasi, yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian, perencanaan, dan evaluasi kinerja. Selain itu, hal ini memainkan peran penting dalam memantau dan menyusun proses industri, memberikan wawasan berharga dan kondisi kerangka kerja untuk memandu proses pengambilan keputusan.

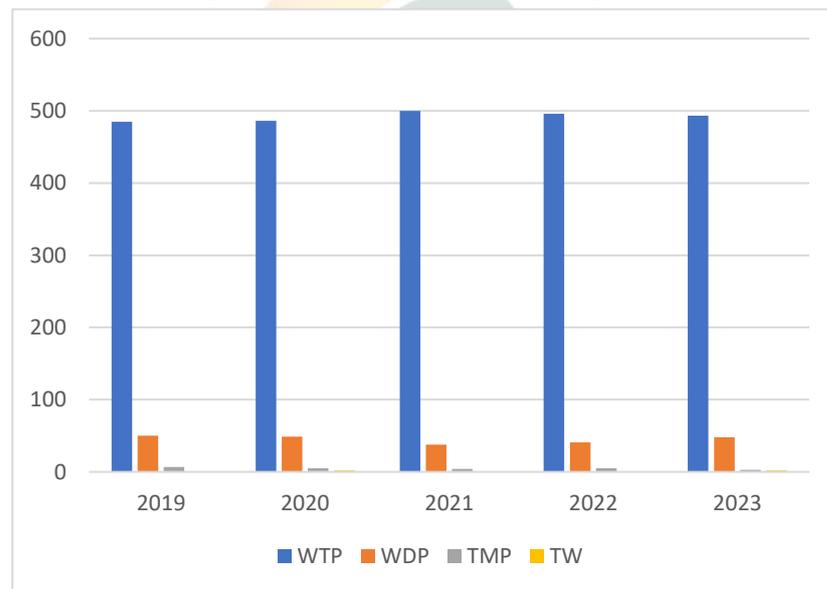
Kualitas sistem informasi akuntansi menggambarkan karakteristik yang diinginkan pengguna dalam menghasilkan informasi. Karakteristik dari kualitas sistem informasi itu adalah andal dan terintegrasi yang dibuktikan dengan sistem mampu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan benar dan akurat. Sistem yang baik adalah sistem yang terintegrasi dan terkoneksi antar sub sistem dan antar sistem. (J. Darma & Hafiz Sagala, 2020) dalam mencapai kualitas sistem informasi akuntansi dapat diukur dengan menggunakan Integrasi (*Integration*), Fleksibel (*flexibility*), dan Efisiensi (*efficient*) (Astuti et al., 2019)

Dengan demikian penerapan dari standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi memiliki peran yang baik dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. SAP berperan dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sistem informasi akuntansi berperan dalam menciptakan laporan keuangan yang cepat, efektif, dan efisien.

Proses penyusunan laporan keuangan menjadi proses yang cukup penting dalam suatu organisasi, karena untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu instansi dalam satu periode dapat dilihat dari hasil laporan keuangannya. Dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas setidaknya perlu memenuhi dimensi dari penilaian kualitas laporan keuangan seperti : (1) relevan, (2) keandalan, (3) dapat dibandingkan dan (4) dapat dipahami. (Herindraningrum F & Yuhertiana, 2021)

Setiap tahunnya kualitas laporan keuangan pemerintah di nilai dan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan badan

independen dan diamanatkan oleh UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam penilaiannya BPK dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan keuangan yang disajikan pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* termasuk Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Tidak Wajar (TW) atau *adversed opinion* dan Tidak Memberi Pendapat (TMP) atau *disclaimer of opinion*. Dalam menetapkan opini atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merujuk pada sejumlah kriteria utama, antara lain kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas yang diperiksa. (BPK RI, 2020).



**Gambar 1. 1 Hasil Pemeriksaan Atas LKPD 5 Tahun Terakhir**  
(Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK RI, Tahun 2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula 89,5% pada tahun 2019 menjadi 90,3% pada tahun 2023. Jumlah Pemerintah daerah yang mendapat WTP dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 jumlah WTP mencapai 485 atau 89,5% dan pada tahun 2023 mencapai 493 atau 90,3% dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 500 pemerintah daerah atau sebesar 92,3%. Kemudian jumlah pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mengalami penurunan dari 50 atau 9,2% pada tahun 2019 menjadi 48 pemerintah daerah atau 8,8% begitu pun dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mengalami penurunan dari 7

pemerintahan daerah menjadi 3 pemerintah daerah saja, sedangkan Pemerintah daerah yang mendapat opini tidak wajar hanya 2 pemerintah daerah yang terjadi pada tahun 2020 dan 2023.

Pada tahun 2023 juga BPK juga menemukan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Dimana dari 546 laporan hasil pemeriksaan ditemukan sebanyak 8.078 temuan dan dari 13.271 permasalahan yang ada 1.573 diantaranya adalah permasalahan dalam Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dengan jenis temuan kelemahan Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai sebanyak 295 permasalahan yang terjadi pada 225 entitas kemudian jenis temuan Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai sebanyak 17 permasalahan yang terjadi pada 15 entitas dan juga jenis temuan Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi sebanyak 422 permasalahan dan terjadi pada 241 entitas. (BPK RI, 2024)

Berdasarkan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Pemerintah Kabupaten Cirebon meraih hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini menjadi raihan Opini WTP ke-9 kali berturut-turut. Kesuksesan dalam meraih dan mempertahankan opini WTP ini membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik dan akuntabel. Namun begitu, masih terdapat catatan dari BPK terutama dalam hal Pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti pada hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2021 BPK menemukan bahwa pengelolaan Aset Tetap pada pemerintah Kabupaten Cirebon belum memadai, Volume 11 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada DPUPR kurang dari yang ditetapkan dalam kontrak senilai Rp. 648 045.447,74. Kemudian potensi kelebihan bayar iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran yang wafat, pindah domisili dan data ganda minimal sebesar Rp. 539.635.500,00. Dan data peserta tanpa Kelengkapan Nomor Identitas Kependudukan Sebesar Rp. 1.975.656.000,00. Namun permasalahan itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. BPK juga memberikan saran agar Kepala OPD terkait lebih optimal dalam pencatatan aset sesuai dengan kodefikasinya, mencatat aset dalam bentuk rincian per item barang, menginput atribut-atribut utama aset seperti No. Register, Luas dan lokasi, menginput rincian aset sesuai dengan nilai perolehannya dan kebijakan akuntansi dalam kertas kerja perhitungan penyesuaian.

Contoh kasus lain yang terjadi salah satunya terjadi pada pemerintah provinsi Riau dalam tahun 2018-2019 khususnya dalam ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan yang mengakibatkan dampak finansial sehingga kurangnya penerimaan negara/daerah mencapai Rp. 34,2 miliar. (Mulyani et al., 2022)

Hasil riset yang dilakukan oleh (Rohmah et al., 2020) menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian serupa dilakukan juga oleh Agustin, D (2019) dan (Chairina & Wehartaty, 2019) yang menunjukkan bahwa kualitas dari sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang berkualitas bisa mempengaruhi laporan keuangan yang disajikan.

Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya, studi yang dilakukan oleh (Ramadhan & Nurabiah, 2024) mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan BPKAD Pemerintah Kota Bima. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman aparatur atau pegawai yang menangani keuangan terkait penerapan standar akuntansi tersebut masih tergolong rendah, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka beberapa masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Meskipun terdapat peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, masih terdapat catatan mengenai pengelolaan aset dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya optimal.

- b. Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masih menjadi sorotan publik.
- c. Masih terdapat indikasi kurangnya pemahaman akan standar akuntansi pemerintah yang bisa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- d. Meskipun SIA sudah diterapkan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih adanya kelemahan dalam kualitas Sistem Informasi Akuntansi.
- e. Sistem Informasi Akuntansi belum didukung oleh SDM yang memadai.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan, penelitian ini hanya berfokus pada pengetahuan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten cirebon?
- c. Bagaimana pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang telah diungkapkan diatas yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
2. Untuk Menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

#### **D. Sistematika Penelitian**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas dan memaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini menyajikan teori-teori maupun temuan-temuan yang berkaitan dengan penelitian yang didasarkan pada hasil literatur review yang merinci guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hipotesis dan aspek-aspek kunci yang perlu dianalisis dalam penelitian ini.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini memuat prosedur yang dilakukan dalam upaya penelitian. Mencakup hal-hal seperti jenis penelitian, sumber informasi penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

##### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasan. Tujuan bab ini adalah untuk menyajikan dan menganalisis data penelitian serta membahas implikasi dan Kesimpulan berdasar teori yang terkait. Dalam penelitian ini akan menjabarkan tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Dilanjut dengan pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

##### **BAB V : PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian dibahas dalam kesimpulan dan memberikan jawaban singkat terhadap

masalah yang dibahas. Selain itu, penulis akan memberikan saran dan rekomendasi mengenai masalah saat ini berdasarkan temuan hasil penelitian.



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**